

**RANCANGAN RENJA
PERUBAHAN
TAHUN 2022**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Pembangunan Kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut dilaksanakan program-program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan agar setiap Kementerian/Lembaga harus menyusun rencana kerjanya. Dengan demikian Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 di susun kembali dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Tanjab Barat Tahun 2022 – 2026, sehingga dokumen Ranwal Renja ini diharapkan dapat dipergunakan oleh semua unsur Dinas termasuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan program.

Kami mengucapkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022. Semoga dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan, dapat bermanfaat untuk program pembangunan di bidang kesehatan.

Kuala Tungkal, Juni 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Zaharudin, SKM

Pembina IV.a

NIP. 196704071991031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	24
3.3 Program dan Kegiatan	27
BAB IV PENUTUP	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional, yang dituangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dalam SDGs terdapat tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu target 4 (menurunkan angka kematian anak), target 5 (meningkatkan kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi HIV dan AIDS, TB dan Malaria serta penyakit lainnya), juga 2 target lainnya yang tidak terkait langsung yaitu target 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan), target 3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan). Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi untuk pencapaian target-target tersebut.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Untuk itu perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, bermutu dan berkesinambungan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan program-program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka di susunlah Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Rencana kerja tahunan ini adalah dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan dan atau sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan program pembangunan kesehatan.

Rencana Tahunan Dinas Kesehatan ini merupakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Tahunan ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaian Indikator Kinerja dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana kerja pemerintah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43/Menkes/SK/V/2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 -2026
17. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan. Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi program untuk perencanaan yang akan datang, agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif, dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

khususnya di bidang kesehatan. Adapun maksud dan tujuan di buatnya Renja Kerja (Renja) Dinas Kesehatan adalah :

1. Penjabaran program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan selama tahun 2022.
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dalam jangka waktu satu tahun (Renja SKPD) yaitu tahun 2022.
3. Memberikan arah terhadap kebijakan dinas kesehatan, strategi pembangunan kesehatan, dan program-program pembangunan kesehatan lintas program dan lintas sektoral.
4. Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan tahun 2022.

2.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 sampai dengan triwulan II dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota																											
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat																											
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2022																											
No	Sasaran	Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan anggaran Renja Perangkat daerah tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun...)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021 (%)		Unit Perangkat daerah yang bertanggung jawab			
										I		II		III		IV											
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K	Rp	K
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
		I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kinerja Organisasi perangkat Daerah yang akuntabel		128.698.700,000		137.184.539.775		20.559.341.424		17.260.897.691		37.189.684.083								37.189.684.083		174.374.223.858		1.35		
		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Program dan Anggaran		220.000,000		206.215,390		459.700,000		31.031,550		44.131,550								44.131,550		250.346,940		1.14		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen DPA OPD Penyusunan Dokumen RKA OPD Rancangan Akhir Renja Rancangan Akhir Renstra Rancangan Renja Rancangan Renstra	5 Dokumen	115.000,000		109.779,09		22.800,000	14.2		20.55		20.701,550,0							20.55		20.701,550,0		130.480,64		1.13
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dan Kinerja SKPD	0	105.000,000		96.436,306		436.900,000	1725		24.16		23.430,006							24.16		119.866,306		1.14		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Keuangan Perangkat Daerah		83.335.000,000		79.378.775,115							10.236.407,560							24.287.661,066		103.766.436,181		1.25		

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediany Gaji dan Tunjangan Bagi ASN	16 Puk dan 2 RSUD, 1 IFK dan Dinkes	82,000,000,000	78,244,990,36			12.2	28.57					28.57			102,260,351,431	1.25
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersediany Honorarium Pengelolaan Keuangan	16 Puk dan 2 RSUD, 1 IFK dan Dinkes	1,250,000,000	1,100,783,75		2,051,210,100	15.48	27.85					27.85			1,450,383,750	1.16
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemerikasaan				160,520,35			61.29	61.29					61.29			9,500,000	
	Rekonsiliasi dan Penyusun Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milk Daerah pada SKPD			56,144,050			0	6.1					6.1			2,200,000	
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			104,376,300			0	22.15					22.15			11,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			712,500,000	2,487,731,605		1,290,500,000										2,537,407,105	3.56

	1.00	0.93	0.62	1.84	0.67	2.07
	261,621,567	416,944,515	1,445,524,404	304,390,227	137,697,728	1,056,022,622
	49,675,500	0	789,280,154	28,171,076	123,282,720	144,060,000
17.82	0			39.66	18.98	45.22
	49,675,500	0	789,280,154	28,171,076	123,282,720	144,060,000
17.82	0			39.66	18.98	45.22
	49,675,500		417,951,430	20,083,810	40,865,720	55,780,000
17.82	0			28.28	6.29	17.51
	800,500,000	0	18,809,141,424	250,282,100		2,126,527,635
	211,946,067	416,944,515	656,244,250	276,219,151	14,415,000	911,962,622
100%				12		
	262,500,000	450,000,000	2,341,200,000	165,200,000	205,000,000	510,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya	2000 Stel	Tersedianya Pakaian Dinas				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150 Orang	Jumlah Nakes yang mengikuti Bimtek				
Adminis trasi Umum Perangkat Daerah						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Listrik				
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Tersedianya Komponen Listrik				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Tersedianya Alat Tulis Kantor				

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak	12 Bulan		12			404.996,250	10,58	65,68				65,68			102.812,60	2.280.464,715	8,29
				275.000,00		2.177.652,111													
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan	12 Bulan		12			74.000,000	16,5	16,5				16,5			3.960,000	3.960,000	0,11
				36.000,000															
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksanaan Rapat Rapat Koordinasi	12 Bulan		12			2.811.140,000	30,07	41,15				41,15			386.993,75	2.564.645,865	2,23
				1.150.000,000		2.177.652,115													
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						0	0	0				0			0		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																32.835,000	2.418.147,139	1,97
				1.225.000,000		2.385.312,139													
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	10 Unit					0	0	8,81				8,81			32.835,000	1.956.273,803	1,78
				1.100.000,000		1.923.438,803													

	0.42	158.57	0.23	1.74	0.25	25.02
	1,258,695,846	3,171,389,655	556,847,886	893,661,644	474,673,900	2,376,941,500
	807,395,375	1,518,000	508,564,58	297,312,79	314,507,900	11,868,000
	6.7	26.22	27.4		11.93	
	807,395,375	1,518,000	508,564,58	297,312,79	314,507,900	11,868,000
	6.7	26.22	27.4		11.93	
	361,944,131	1,518,000	307,016,58	53,409,544	71,206,500	8,268,000
	6.7	15.83	4.92		8.31	
	63,300,000	2,309,535,155	851,866,584		1,381,170,000	
	451,300,471	3,169,871,65	48,283,304	596,348,851	160,166,000	2,365,073,500
	12	12	12			
	2,985,000,000	20,000,000	2,450,000,00	515,000,00	1,880,000,000	95,000,000
	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		4 Unit	
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Listrikair dan telp Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor		Tersedianya Biaya Operasional Kendaraan dinas Jabatan	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						

	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pembangunan IPAL Puskesmas, Sarana Air Bersih, Ambulance Puskesmas, Mobil Promkes dan Sanitarian Kit	2 unit	1,000,000,000	10,237,887,370	7,592,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,237,887,370	10.24
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Posbindu	2 RS	4,000,000,000		95,800,885,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat yang dikalibrasi		0	686,407,888	224,501,720	0.9	0.9	2,250,000	397,479,000	2,250,000	0.9	686,657,888		
	Pengadaan Obat, Vaksin	Presentase Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas	92%	5,820,948,57		9,572,758,000	3.04	10.88	1,421,331,900	397,479,000	1,421,331,900	10.88	1,421,331,900	0.24	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Presentase Ketersediaan BMHP Puskesmas	92%	1,500,000,000	102,658,000		5.94	15.54	1,630,396,450	623,058,000	1,630,396,450	15.54	1,733,054,455	1.16	
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					0	14.82		0		14.82			

	0.21							
		0.12						
			2.90					
				112.56				
					8.18			
						5.21		
							3.93	
	246,214,600	3,318,023,460	409,030,500	19,135,620,059	2,044,985,050	380,206,250	397,617,100	
	221,018,000	3,318,023,460	402,630,500	22500000	5,820,000	380,206,250	397,617,100	
55.95			13.92	1.78	6.42	14.37	19.05	
	221,018,000	3,318,023,460	402,630,500	22500000	5,820,000	380,206,250	397,617,100	
55.95			13.92	1.78	6.42	14.37	19.05	
69,833,000	6,215,493,300	402,630,500	2,250,000	5,820,000	378,826,250	386,817,100		
17.68			13.92	1.78	6.42	14.32	18.53	
824,000,000	76,442,332,511	359,967,500			207,615,000		883,612,900	
25,196,600		6,400,000	19,133,370,059	2,039,165,050				
1,200,000,000	27,009,824,000	141,015,000	170,000,000	250,000,000	73,000,000	101,250,000		
16 Puskesmas dan 2 RS				100%	100%	100%	100%	
Pereliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Presentase Persalinan Oleh Nakes di Faskes	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Penanganan KLB < 24 Jam	Persentase Ibu Hamil Anemia	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut							0	0	0	0				0	0			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan ODF (Open Defecation Free)/ Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan	2,2%	150.000,00	40.067.943	354.300.000	22.51	143.780,00	22.51	143.780,00				22.51	143.780,00	183.847.943			1.23
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan GERMAS.	2 kec	150.000,00	137.500.000	1.137.409.711	10.35	5.550,000	13.62	7.300,000				13.62	7.300,000	144.800.000			0.97
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Desa UCI	95%	150.000,00	1.681.858.564	153.978.500	6.95	6.600,000	6.95	6.600,000				6.95	6.600,000	1.688.458.564			11.26
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan kepada Orang dengan masalah kesehatan Jiwa (ODMK)	100%	37.400,000		48.395.000	5.3	1.800,000	5.3	1.800,000				5.3	1.800,000	1.800.000			0.05
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terselenggaranya Kegiatan Donor Darah	2000 Kantong Darah	200.000,000		118.637.000	1.99	2.250,000	1.99	2.250,000				1.99	2.250,000	2.250.000			0.01
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Lokasi yang Dilakukan Pemutusan Mata Rantai Penularan DBD	100%	365.185,000		1.240.521.000	18.94	651.000,000	18.94	651.000,000				18.94	651.000,000	651.000.000			1.78

	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	95%	7,000,000,00	183,742,750	7,235,549,400	0.25	0.27	15,600,000	17,100,000	0.27	17,100,000	200,842,750	0.03
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Pelayanan di rumah sakit	2 RSUD	550,000,00	599,077,392	37,161,711,500	24.29	32.63	3,154,350,00	1,029,250,00	32.63	1,029,250,00	1,628,327,392	2.96
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKP dan UKM	16 Puskesmas	12,000,000,00	1,450,118,200	14,000,000,000	24.16	24.16	806,298,75	194,765,75	24.16	194,765,75	1,644,883,950	0.14
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		13 Kec	250,000,00	49,610,000	14,000,000,000	10.43	22	247,345,70	54,412,500	22	54,412,500	104,022,500	0.42
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang di Akreditasi	100%	100,000,00	297,233,761	1,790,411,000	0	0	0	0	0	0	297,233,761	2.97
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					0.27	3.76	450,000	6,291,360	3.76	6,291,360		

	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan SDM	1500 orang	92.500,000	249.961,200	1.685.022,000	10.02	10.02	5.250,000	5.250,000	5.250,000	5.250,000	255.211,200	2.76
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			119.644,500	245.392,419	690.383,000			67.210,000	92.260,000	92.260,000	92.260,000	337.652,419	2.82
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								24.680,000	46.330,000	46.330,000	46.330,000		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					13.44	25.24	24.680,000	46.330,000	46.330,000	46.330,000		
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			55.320,000	245.392,419				2.250,000	2.250,000	2.250,000	2.250,000	247.642,419	4.48

	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti bintek Keamanan Pangan	80 Orang	55,320,000	1,528,284,462	290,132,000	4.09	4.09	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	1,530,534,462	27.67
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			64,324,500	1,528,284,462	290,132,000			40,380,000	43,680,000	43,680,000	43,680,000	1,571,964,462	24.44
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah industri rumah tangga yang mendapatkan sertifikat izin PIRT	10%	64,324,500	1,528,284,462	290,132,000	14.51	15.7	40,380,000	43,680,000	43,680,000	43,680,000	1,571,964,462	24.44
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			20,000,000		448,661,828			205,370,000	205,370,000	205,370,000	205,370,000	205,370,000	10.27
	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			20,000,000		448,661,828			205,370,000	205,370,000	205,370,000	205,370,000	205,370,000	10.27

	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase rumah tangga yang ber PHBS	2 Kec	4		448.661.828	20.09		20						205.370.000		283.060.000		14.15	
															205.370.000					
														Rata rata Capaian Kinerja (%)		55%				
														Predikat kinerja						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *):																				

Membaca tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan masyarakat sudah memenuhi target yang di tentukan, namun demikian masih banyak kendala-kendala yang harus di selesaikan dalam hal peningkatan derajat kesehatan masyarakat antara lain :

1. Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh lapisan masyarakat.
2. Kinerja pelayanan kesehatan yang belum didukung oleh sarana dan prasarana yang optimal menyebabkan masih tingginya angka kematian ibu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Masih rendahnya perilaku masyarakat dalam mendukung pola hidup bersih dan sehat.
4. Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.
5. Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan terutama alat kesehatan.
6. Terbatasnya kegiatan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Isu strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Percepatan Penurunan stunting,
2. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular masih tinggi;
3. Rendahnya pemanfaatan sarana kesehatan lingkungan sehingga kualitas lingkungan masih rendah. Cakupan sanitasi dasar seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan sarana pembuangan air limbah rendah, serta proporsi rumah sehat rendah;
4. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh;
5. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah;
6. Belum optimalnya capaian dan kualitas promosi kesehatan pada kelompok rentan;

Strategi yang ditetapkan terdiri atas :

1. Intervensi terhadap stunting
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan;
4. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan;
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan lainnya;
7. Penyehatan lingkungan;.
8. Penguatan manajemen kesehatan.

Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan promosi kesehatan menjadi prioritas pembangunan kesehatan;
2. Peningkatan status gizi masyarakat;
3. Percepatan penurunan kematian ibu dan anak;
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin di daerah terpencil;
5. Pemenuhan ketersediaan dan pengendalian obat, perbekalan kesehatan dan makanan;
6. Peningkatan manajemen kesehatan dan pembiayaan kesehatan;
7. Peningkatan SKD (sistem kewaspadaan dini), pencegahan, pengendalian penyakit dan masalah kesehatan lainnya;
8. Peningkatan lingkungan sehat;
9. Penyediaan tenaga kesehatan dan mendayagunakan tenaga kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan;
10. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
11. Pengaturan sistem informasi kesehatan yang komprehensif dan pengembangan jejaring.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari permasalahan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berikut factor penghambat dan faktor pendorong pembangunan kesehatan sesuai yang telah di uraikan pada bab diatas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil kesimpulan bahwa peranan masyarakat untuk sadar hidup sehat adalah pokok utama dari keberhasilan pembangunan kesehatan.

Setelah mengetahui inti permasalahan pembangunan tersebut Dinas Kesehatan Menentukan Isu – Isu Penting Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Percepatan Penurunan Stunting
2. Pencegahan Penyakit Menular dan tidak menular
3. Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi
4. Upaya Promotif dan Preventif bidang kesehatan
5. Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan dan sumber daya kesehatan
6. Peningkatan status kesehatan ibu dan anak serta Gizi masyarakat
7. Meningkatkan perlindungan Financial terutama untuk masyarakat miskin dan tidak mampu

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana kerja pemerintah Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dinas kesehatan dengan seksama memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan dan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat, maju dan mandiri dengan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu: Pro Rakyat, Inklusif, Responsif, Efektif, dan Bersih.

Dengan memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan tersebut, dan untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2026 seperti telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 - 2026, dan juga mempertimbangkan perkembangan, masalah, serta kecenderungan pembangunan kesehatan ke depan, adapun Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam RPJMD adalah :

**Visi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah
‘Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil,
Makmur, Bermartabat dan Berkualitas’.**

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

MAJU berarti daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.

ADIL berarti kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

MAKMUR berarti kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

BERMARTABAT berarti suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.

BERKUALITAS berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

Misi Daerah

Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai Visi Daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.

4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Visi Pembangunan Kabupten Tanjung Jabugn Barat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari visi Pembangunan Nasional Propinsi Jambi Tahun 2005-2025 dan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 yang kesemuanya secara sistematis dan sinergis diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Kesehatan merupakan Misi Pertama sesuai yang tertera di dalam RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berahlak mulia, dengan mengedepankan pembangunan pendidikan dan **kesehatan yang berkualitas** dan berkeadilan, pengendalian jumlah penduduk, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, meningkatnya kualitas kualitas kehidupan beragama, mengembangkan budaya yang berbasis iptek dan kearifan lokal.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemberdayaan dan promosi kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan upaya kesehatan primer, sekunder dan tertier pada masyarakat dan meningkatkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat;
3. Mencegah, menurunkan dan mengendalikan penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan kesehatan lingkungan;
4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi kesehatan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan.

3.3 Program dan Kegiatan

TABEL T-C.33													
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022													
PERUBAHAN													
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT													
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN													
KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN. SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU SEBELUM PERUBAHAN				CATATAN PENTING	PAGU SETELAH PERUBAHAN	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							19,901,066,241	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	Dinkes,,Puskesmas, IFK	5 Dokumen 100,747,647	APBD	5 Dokumen 100,747,647		-	
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja OPD	Dinkes,,Puskesmas, IFK	4 Dokumen 96,960,000	APBD	4 Dokumen 96,960,000		-	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							-	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediany Gaji dan Tunjangan Bagi ASN	Dinkes,,Puskesmas, IFK	16 Puks, I IFK dan Dinkes 60,846,607,837	APBD	16 Puks, I IFK dan Dinkes 63.368.186.193		2.521.578.356	

1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Pengelolaan Keuangan	Dinkes, Puskesmas, IFK	16 Puks, 1 IFK dan Dinkes	809,360,000	APBD		16 Puks, 1 IFK dan Dinkes	809,360,000	-
1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dinkes, Puskesmas, IFK	1 Dokumen	15,500,000	APBD		1 Dokumen	15,500,000	-
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah									-
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Puskesmas dan RSUD yang melakukan Updatedan validasi data sarana, prasarana dan alat kesehatan	Dinkes, Puskesmas, IFK	16 Puks, 1 IFK dan Dinkes	36,050,000	APBD		16 Puks, 1 IFK dan Dinkes	36,050,000	-
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									-
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	Dinkes, IFK	165 Stel		APBD			95,250,000	95,250,000
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dinkes, Puskesmas, IFK	20 Dok	49,655,500	APBD		20 Dok	49,655,500	-
1	02	01	2.05	05	Evaluasi Data, Informasi dan sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Dinkes, Puskesmas, IFK	1 Dok		APBD		1 Dok	75,000,000	75,000,000
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					APBD				-
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	Dinkes, Puskesmas, IFK	12 Bulan	40,029,186	APBD		12 Bulan	40,029,186	-
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Dinkes, Puskesmas, IFK	12 Bulan	92,439,710	APBD		12 Bulan	106,739,710	14,300,000
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumdis	Rumdis Eselon II	1 Set		APBD			75,000,000	75,000,000

1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makan dan Minum Rapat	Dinkes, Puskesmas, IFK	12 Bulan	11,910,000	APBD		12 Bulan	13,910,000	2,000,000
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak	Dinkes, Puskesmas, IFK	12 Bulan	49,548,300	APBD		12 Bulan	53,548,300	4,000,000
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan	Dinkes, Puskesmas, IFK	12 Bulan	24,000,000	APBD		12 Bulan	24,000,000	-
1	02	01	2.06	09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksanaan Rapat Rapat Koordinasi	Dinkes, Puskesmas, IFK	12 Bulan	429,717,000	APBD		12 Bulan	439,717,000	10,000,000
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					APBD				-
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah moubeler tersedia	Dinkes, Puskesmas, IFK	35Set	35,000,000	APBD		100 Set	287,637,500	252,637,500
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perangkat Elektronik dan mesin	Dinkes, Puskesmas, IFK	10 Unit	13,585,000	APBD		10 Unit	192,885,000	179,300,000
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					APBD				-
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Dinkes, Puskesmas, IFK	12 Bulan	10,800,000	APBD		12 Bulan	10,800,000	-
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Listrik, air dan telp Kantor	Dinkes, Puskesmas, IFK	12 Bulan	695,608,000	APBD		12 Bulan	732,008,000	36,400,000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Alat Kebersihan Kantor	Dinkes, Puskesmas, IFK	12 Bulan	89,475,758	APBD		12 Bulan		89,475,758
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					APBD				-
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Biaya Operasional Kendaraan dinas Jabatan	Dinkes, Puskesmas, IFK	4 Unit	79,486,816	APBD		4 Unit	79,486,816	-

1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Biaya Operasional Kendaraan Lapangan dinas Jabatan	Dinkes,Puskesmas, IFK	36 Unit	198,921,924	APBD		36 Unit	276,121,924	77,200,000
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Pelatan dan Mesin	Dinkes,Puskesmas, IFK	20 Unit jenset, 300 AC, 80 Unit Komputer, 5 unit Sumur Bor	18,160,000	APBD		20 Unit jenset, 300 AC, 80 Unit Komputer,	67,970,000	49,810,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang terpelihara	Gedung	6 Gedung	77,010,000	APBD		9 Gedung	627,010,000	550,000,000
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD									-
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas	16 Puskesmas	16 Puskesmas	11,451,309,000			16 Puskesmas	14,525,531,846	3,074,222,846
														-
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									-
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									-
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									-
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota									-
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Renovasi dan Peningkatan Puskesmas	Puskesmas	4 Pusk	488,448,984	APBD/ DAK		7 Pusk	588,448,984	100,000,000
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									-
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Yang dibangun	Puskesmas/RSUD	10 Rumdis		APBD		10 Rumdis		-

1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung yang di bangun	RSUD	1 RSUD		APBD		1 RSUD		-
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Bangunan IGD yang di bangun	Puskesmas	5 Puskesmas	3,751,570,000	APBD		16 Puskesmas	5,951,570,000	2,200,000,000
1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya					APBD				-
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Gedung yang dipelihara	RSUD	2 RS		APBD		2 RS		-
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di rehap	Puskesmas	1 Puskesmas	592,000,000	APBD		15 Puskesmas	4,092,000,000	3,500,000,000
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Faskes lainnya yang dipelihara		1 Faskes		APBD			500,000,000	500,000,000
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah dinas yang di Rehap	Puskesmas	5 Rumdis		APBD		5 Rumdis		-
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan									-
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah IPAL Puskesmas yang di bangun	Puskesmas	3 IPAL	2,057,378,000	DAK		3 Ambulance	3,857,378,000	1,800,000,000
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan sesuai stadar	RSUD	2 RS	6,178,330,000	DAK		2 RS	6,178,330,000	-
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Puskesmas	16 Puskesmas	16 Puskesmas	67,725,000	APBD			167,725,000	100,000,000

1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Presentase Ketersediaan Obat Esensial di Puskesmas	16 Puskesmas	92%	6,260,371,000	APBD/ DAK		92%	6,260,371,000	-	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Presentase Ketersediaan BMHP Puskesmas	16 Puskesmas	92%	2,269,003,000	APBD/ DAK		92%	2,344,003,000	75,000,000	
1	02	02	2.01	21	Distribusi alat kesehatan Obat, Vaksin, Bahan medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman ke Psukesmas serta Fasilitas kesehatan lainnya	16 Puskesmas	16 Puskesmas	16 Puskesmas	221,998,000	APBD		9 Pustu	221,998,000	-	
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					APBD				-	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang dipelihara	Dinkes,Puskesmas, IFK	2 RS			APBD		2 RS		-
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					APBD				-	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal Minimal 4 kali (K4)	16 Puskesmas	90%		APBD		90%		-	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Presentase Persalinan Oleh Nakes di Faskes	16 Puskesmas	91%	2,891,918,357	APBD/ DAK		91%	2,891,918,357	-	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)	16 Puskesmas	90%		APBD		90%		-	

1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Presentase Cakupan Pelayanan Anak Balita	16 Puskesmas	75%		APBD		75%		-
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Presentase Puskesmas Melaksanakan Penjangkaran Kesehatan untuk peserta didik kelas 1 s/d 9	16 Puskesmas	80%		APBD		80%		-
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang umur 15 - 59 tahun mendapat skrining sesuai standart	16 PKM	90% (205.200 Jiwa)		APBD/DAK	Perkiraan Stik Gula darah Rp 6000/Pcs	92.5% (205.200 Jiwa)		-
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Presentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lanjut usia	16 PKM	60%	45,705,064	DAK		65%	45,705,064	-
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	16 PKM	100%		APBD		100%		-
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	16 PKM	100%		APBD		100%		-

1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart	16 PKM	100%		APBD		100%		-
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16 Puskesmas	100%	126,052,035	APBD		100%	126,052,035	-
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	16 Puskesmas	100%	90,709,968	APBD		100%	90,709,968	-
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Penanganan KLB < 24 Jam	16 Puskesmas	100%	2,645,698,332	APBD		100%	4,306,248,332	1,660,550,000
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana									-
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Anemia	16 Puskesmas	11%	2,087,454,004	APBD/ DAK		10.5%	2,412,454,004	325,000,000
						Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	16 Puskesmas	11%				10.5%		-
						Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	16 Puskesmas	98%				98%		-

					Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	16 Puskesmas	95%				95%		-
					Cakupan Ibu Nifas Mendapat Kapsul Vitamin A	16 Puskesmas	98%				98%		-
					Persentase Bayi dengan Berat Badan Rendah (berat badan < 2500 gram)	16 Puskesmas	3%				2.5%		-
					Cakupan Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	16 Puskesmas	61%				63%		-
					Cakupan Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	16 Puskesmas	61%				63%		-
					Cakupan Bayi Usia 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	16 Puskesmas	61%				63%		-
					Cakupan Balita 6-59 bulan mendapat Kapsul Vitamin A	16 Puskesmas	92%				93%		-
					Cakupan Balita Gizi Kurang Mendapat Makanan Tambahan	16 Puskesmas	95%				95%		-

						Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	16 Puskesmas	100%					100%		
						Cakupan Balita yang di Timbang Berat Badannya (D/S)	16 Puskesmas	92%					93%		
						Cakupan Balita memiliki Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA)/Kartu Menuju Sehat (KMS) (K/S)	16 Puskesmas	100%					100%		
						Cakupan Balita ditimbang yang Naik Berat Badannya (N/D)	16 Puskesmas	85%					87%		
						Prevalensi berat badan kurang (Berat badan kurang dan sangat kurang) pada balita (BB/U)	16 Puskesmas	4					3.5		
						Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (TB/U)	16 Puskesmas	17					15		
						Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi Buruk) pada balita (BB/TB)	16 Puskesmas	6.8					6.5		

						Cakupan Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	16 Puskesmas	55%				58%		-
						Cakupan Rumah Tangga Mengonsumsi Garam Beriodium	16 Puskesmas	93%				94%		-
						Persentase Kabupaten/Kota melaksanakan Surveilans Gizi	16 Puskesmas	100%				100%		-
						Persentase Puskesmas mampu Tatalaksana Gizi Buruk pada Balita	16 Puskesmas	100%				100%		-
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Puskesmas	65%			APBD	70%	80,000,000	80,000,000
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Desa/ Kelurahan ODF (Open Defecation Free)/ Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan	Desa	60%	638,632,089		APBD	65%	1,202,462,289	563,830,200
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Kecamatan yang menerapkan kebijakan GERMAS.	Tanjung Jabung Barat	3 kec		53,600,000	APBD	3 kec	53,600,000	-

1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Tenaga kesehatan dan kader yang terlatih	Puskesmas	64 orang		APBD		64 orang	75,000,000	75,000,000
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase Desa UCI	Desa	95%	94,998,083	APBD		95%	94,998,083	-
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan kepada Orang dengan masalah kesehatan Jiwa (ODMK)	Kuala Tungkal	100%	33,931,672	APBD		100%	33,931,672	-
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Nafza di Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL) dipuskesmas	7 Kecamatan	100%		APBD		100%		-
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terselenggaranya Kegiatan Donor Darah	Tanjab Barat	2000 Kantong Darah	113,275,944	APBD		2000 Kantong Darah	113,275,944	-
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Kejadian Krisis Kesehatan yang direspon < dari 24 Jam	16 Puskesmas	16 Puskesmas		APBD		16 Puskesmas		-

1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Lokasi yang Dilakukan Pemutusan Mata Rantai Penularan DBD	Tanjab Barat	16 Lokasi	3,437,805,627	APBD	16 Lokasi	3,437,805,627	-
						Terlaksananya Pencegahan Timbulnya Kasus Malaria Indegenous	Tanjab Barat	100%		APBD	100%		-
						Jumlah Penemuan Kasus Pneumonia pada balita di puskesmas	Tanjab Barat	3,15% dari Jumlah Balita		APBD	3,15% dari Jumlah Balita		-
						Refresing Kader Posbindu	16 Puskesmas	100% (45 Desa/Kel)		APBD	100% (45 Desa/Kel)		-
						Terlaksananya Pertemuan Monev Penyakit Tidak Menular	Kuala Tungkat	100%		APBD	100%		-
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	13 Kecamatan	15,895 Jiwa	6,313,975,400	APBD	19.000 Jiwa	9,822,006,500	3,508,031,100

1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan anak sekolah tentang dampak penyalahgunaan NAPZA & IPWL	10 sekolah	100%			APBD		100%			-
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Presentase Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB	Tanjab Barat	100%			APBD		100%			-
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Tercapainya Kabupaten Kota Sehat	Tanjab Barat	100%			APBD		100%			-
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan											-
1	02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan											-
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	tercapainya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	RSUD	2 RSUD			APBD		2 RSUD			-
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKP dan UKM	Puskesmas	16 Puskesmas	806,298,750		APBD		16 Puskesmas	806,298,750		-
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pelayanan Kegawat daruratan Palang Merah Indonesia (PMI)	13 Kecamatan	100%	247,345,700		APBD		100% 1 Kegiatan	406,345,700	159,000,000	

1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang di Akreditasi	13 Kecamatan	16 Pusk, 2 RSUD	165,200,000	APBD	16 Pusk, 2 RSUD	257,970,000	92,770,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Invenstigasi KIPi yang di Respon	16 Puskesmas	100%		APBD	100%		-
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Ketepatan Kelengkapan Laporan dan Verivikasi Alert	16 Puskesmas	100%		APBD	100%		-
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Kegawat darurat terpadu (SPGDT)	Pelayanan Kegawat darurat	16 Puskesmas	100%	167,136,200	APBD	100%	167,136,200	-
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								-
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Informasi Kesehatan	Dokumen	2 Dokumen	298,700,000	APBD	2 Dokumen	298,700,000	-
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Aplikasi Data Kesehatan	Dokumen	5 Aplikasi		APBD	5 Aplikasi		-
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Puskesmas yang memiliki Perangkat Sistem Kesehatan	Puskesmas	2 Puskesmas		DAK	2 Puskesmas		-
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota								-
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan RSUD	RSUD	2 RSUD		APBD	2 RSUD		-
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang memiliki izin operasional	16 Puskesmas	100%		APBD	100%		-

						Persentase klinik/fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki izin operasional	klinik/fasilitas kesehatan lainnya	100%		APBD		100%		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas melaksanakan evaluasi Kinerja Puskesmas	Puskesmas	16 Puskesmas		APBD		16 Puskesmas		
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas yang memanfaatkan Aplikasi Sistrute	Puskesmas	16 Puskesmas		APBD		16 Puskesmas		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota									
1	02	03	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP	Puskesmas,RS, Apotek, Klinik swasta,Praktik Mandiri	1500 orang		APBD		1500 orang		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota									
1	02	03	2.02	01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya SDM Kesehatan di setiap Puskesmas sesuai dengan standar	Puskesmas dan Rumah Sakit	16 pkm, 2 RS	90,000,000	APBD		16 pkm, 2 RS	156,000,000	66,000,000
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Tersedianya 9 jenis SDM Kesehatan di setiap	Puskesmas dan Rumah Sakit	16 pkm	7,147,000,000	APBD		16 pkm	7,824,250,000	677,250,000

Rancangan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2022

						Puskesmas								
02	03	2.02	02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi	Puskesmas,RS, Apotek, Klinik swasta,Praktik Mandiri	1500 orang	52,394,647	APBD		1500 orang	56,059,000	3,664,353
1	02	03	2.04		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar kompetensi	Puskesmas dan Rumah Sakit	300 orang		APBD		300 orang		
1	02	03	2.04	02	Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan SIP	Puskesmas dan Rumah Sakit	1500 orang		APBD		1600 orang		
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN									
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana distribusi farmasi yang di awasi	13 Kecamatan	28 Apotek, 5 Toko Obat dan 5 Optical	183,580,868	APBD		28 Apotek, 5 Toko Obat dan 5 Optical	183,580,868	

1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Tenaga yang mengikuti Bintek Pengelolaan Distribusi Farmasi	16 Puskesmas	35 Orang		APBD		35 Orang		-
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana yang melakukan pengkajian ulang pemenuhan komitmen perizinan	13 Kecamatan	29 Apotek, 5 Toko Obat dan 5 Optical		APBD		29 Apotek, 5 Toko Obat dan 5 Optical		-
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga									-
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									-
1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Sampel Produk PKRT yang Diperiksa	Tanjab Barat	40 Sampel PKRT		APBD		40 Sampel PKRT		-
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									-
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti bintek Keamanan Pangan	5 Kecamatan	80 Orang	54,999,948	APBD/DAK		80 Orang	54,999,948	-

1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)													
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Pengawasan Kualitas Air Minum Sesuai Standar	Puskesmas	80%			APBD		90%					
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan													
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Pengelola Program PJAS yang mengikuti Pembinaan Keamanan pangan di sekolah	13 Kecamatan	40 Orang			APBD/DAK		40 Orang					
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga													
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah industri rumah tangga yang mendapatkan sertifikat izin PIRT	5 Kecamatan	50 IRTP	278,295,000		APBD/DAK		50 IRTP	278,295,000				
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pengawasan industri rumah tangga pangan	5 Kecamatan	51 IRTP			APBD/DAK		51 IRTP					
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													

Rancangan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2022

1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										-
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Jumlah kebijakan penerapan GERMAS	Tanjung Jabung Barat	2 dokumen		APBD		2 dokumen			-
						2. Jumlah Kecamatan yang Membentuk Saka Bakti Husada (SBH)	Tanjung Jabung Barat	2 Kecamatan				2 Kecamatan			-
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota										-
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1. Persentase rumah tangga yang ber PHBS	Tanjung Jabung Barat	30%	1,022,302,694	APBD		30%	1,022,302,694		-
						2. Jumlah Sekolah dan Pondok Pesantren yang mempromosikan kesehatan (Ber PHBS)		5 sekolah dan 2 pondok pesantren				5 sekolah dan 2 pondok pesantren			-
						3. Jumlah Tema pesan KIE Program kesehatan		7 Tema				7 Tema			-
TOTAL									126,245,716,044				146,146,802,285	22.603.318.597	

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyusun Rancangan Renja Perubahan Tahun 2022.

Rancangan Renja Perubahan ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat Indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 dengan penekanan pada pencapaian sasaran program dan indikator prioritas yang tertuang dalam Issu Strategis Program Pembangunan bidang Kesehatan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah :

- Percepatan Penurunan Stunting
- Pencegahan Penyakit Menular dan tidak menular
- Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi
- Upaya Promotif dan Preventif bidang kesehatan melalui dana desa
- Meningkatkan kualitas jangkauan pelayanan dan sumber daya kesehatan
- Peningkatan status kesehatan ibu dan anak serta Gizi masyarakat
- Meningkatkan perlindungan Financial terutama untuk masyarakat miskin dan tidak mampu

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang selanjutnya dimohon kepada pemangku kepentingan baik eksekutif dan legislative untuk dapat membantu dalam proses perencanaan yang akan kami susun selanjutnya agar pembangunan kesehatan lebih optimal bagi masyarakat.

Dengan ini diharapkan pelaksanaan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengadakan pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Jaringanya dapat dilaksanakan dengan baik dengan ketersediaan pembiayaan yang cukup sesuai dengan usulan yang disampaikan dan dalam pelaksanaan kegiatan secara administrasi keuangan dapat efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kuala Tungkal , Juni 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Zaharudin, SKM

Pembina / IV.a

NIP. 196704071991031006